

## DAMPAK SUBSIDI PUPUK TERHADAP EFISIENSI USAHATANI PADI DI PROVINSI RIAU

Rini Nizar<sup>1</sup> dan Anto Ariyanto<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Pertanian Universitas Lancang Kuning

### ABSTRAK

Kebutuhan beras meningkat sesuai dengan penambahan penduduk. Meningkatnya kebutuhan beras ini berakibat pada keharusan untuk meningkatkan produksi padi. Biaya pengeluaran untuk pupuk mempunyai proporsi yang cukup besar terhadap biaya total usahatani. Untuk itu diperlukan subsidi pupuk oleh pemerintah untuk menekan biaya produksi usahatani padi. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dimana pemilihan responden berdasarkan pertimbangan peneliti. Sampel penelitian ini yaitu pada 3 kabupaten di Provinsi Riau yang menjadi lumbung padi, yaitu Kabupaten Rokan Hilir, dan Kuantan Singingi (Kuansing) untuk mewakili luas panen dan produktivitas tinggi dan rendah. Sebagai pembanding dipilih Kabupaten Pelalawan karena memiliki karakteristik usahatani padi yang khas, yaitu minimnya penggunaan pupuk. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis dampak penggunaan subsidi pupuk terhadap efisiensi usahatani padi di Provinsi Riau. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif, yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik petani dalam memanfaatkan kebijakan pupuk subsidi untuk usahatannya. Hasil penelitian menunjukkan RCR yang dihasilkan oleh usahatani padi yang menggunakan pupuk subsidi lebih tinggi dibandingkan yang tidak menggunakan pupuk subsidi. Hal ini menunjukkan bahwa petani yang menggunakan pupuk subsidi lebih efisien dibandingkan dengan yang tidak menggunakan pupuk subsidi. Kebijakan subsidi pupuk masih sangat diperlukan oleh petani.

**Kata kunci:** *Subsidi pupuk, efisien, persediaan beras*

### PENDAHULUAN

Kebutuhan beras semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk dan terjadinya pergeseran menu dari non beras menjadi beras. Keadaan tersebut mendorong pemerintah untuk mencari terobosan baru guna meningkatkan produksi pangan yang bersifat massal dan integral (Pitoyo, 2003).

Pupuk merupakan salah satu faktor produksi yang menentukan produktivitas usahatani. Pupuk mempunyai proporsi sekitar 13,26 persen terhadap keseluruhan biaya produksi padi per hektar pada setiap musim tanamnya (Marisa, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa pupuk mempunyai proporsi yang besar dalam biaya produksi padi sehingga harus diprioritaskan oleh pemerintah terkait dengan kebutuhan petani.

Produksi tanaman pangan di Provinsi Riau pada umumnya masih terkendala dengan jenis lahan dan kondisi iklim geografis yang ada serta harga produk perkebunan yang masih tinggi dibandingkan dengan harga produk tanaman pangan. Hal ini dapat menimbulkan masalah dalam distribusi pupuk

Disampaikan pada Seminar Nasional "Peranan Teknologi dan Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan", November 2013

halaman 175

bersubsidi yaitu pengalihan pupuk bersubsidi dari subsektor tanaman pangan ke subsektor perkebunan dan dari pupuk bersubsidi ke pupuk non subsidi.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan subsidi pupuk yang telah dimulai sejak tahun 1960, dan kebijakan ini merupakan salah satu dari kebijakan fiskal pemerintah yang ditujukan pada petani dengan tujuan meningkatkan produksi pertanian. Untuk mempermudah pupuk subsidi diterima oleh petani pemerintah juga mengeluarkan peraturan mengenai distribusi pupuk, yang berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag No 07/M-Dag/Per/2/2009) tentang pasokan pupuk yang diharapkan dapat memperbaiki penyaluran pupuk tepat waktu diterima oleh petani.

Untuk meningkatkan produksi padi maka masukan atau faktor-faktor produksi seperti pupuk, tanah, tenaga kerja, modal dan iklim akan mempengaruhi besar kecilnya produksi yang diperoleh, yang selanjutnya juga akan mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan petani padi.

Ada beberapa permasalahan penting dalam pemberian subsidi pupuk yang dihadapi, diantaranya adalah sistem distribusi dari produsen hingga ke petani belum efektif, dan preferensi petani terhadap komoditi pangan masih sangat rendah dibandingkan dengan komoditi tanaman perkebunan di Provinsi Riau. Sehingga timbul pertanyaan berapa besarkah efisiensi usahatani padi bagi petani yang menggunakan pupuk subsidi dengan yang tidak menggunakan pupuk subsidi? Berdasarkan permasalahan ini maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Dampak subsidi pupuk terhadap efisiensi usahatani padi di Propinsi Riau.

## **METODOLOGI**

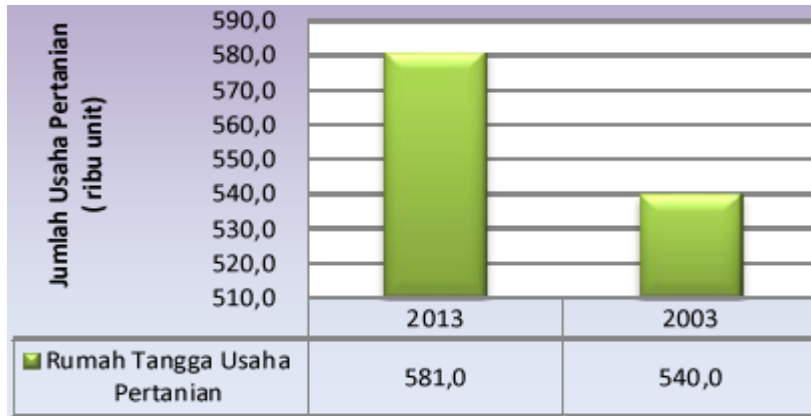
Kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan pada 2 Kabupaten sentra padi di Provinsi Riau yang mewakili karakteristik luas panen dan produktivitas tinggi dan rendah serta 1 kabupaten yang memiliki cara budidaya yang khas karena minimnya penggunaan pupuk. Ketiga Kabupaten tersebut masing-masing adalah 1) Kabupaten Rokan Hilir dan 2) Kabupaten Kuantan Singingi untuk mewakili karakteristik luas panen yang tinggi dan rendah, serta Kabupaten Pelalawan untuk mewakili cara budidaya yang minim penggunaan pupuknya sebagai sampel pembanding. Responden adalah petani yang melakukan usahatani padi. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum**

Pembangunan pertanian memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Riau, yang dapat dilihat dari kontribusi nyata melalui penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan. Jumlah usahatani pertanian di Provinsi Riau pada bulan Mei 2013 sebanyak 581 ribu rumah tangga usaha pertanian. Jumlah rumah tangga usaha pertanian di Provinsi Riau mengalami kenaikan sebanyak 41 ribu rumah tangga dari 540 ribu rumah tangga pada tahun 2003 (Sensus Pertanian 2003) menjadi 581 ribu rumah tangga pada tahun 2013, yang berarti rata-rata peningkatan per tahun sebesar 0,81 persen (Sensus Pertanian 2013).

Disampaikan pada Seminar Nasional "*Peranan Teknologi dan Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan*", November 2013



Gambar 1. Perbandingan Rumahtangga Usahatani di Provinsi Riau Tahun 2003 dan 2013 (Sumber : BPS Provinsi Riau 2013)

Dalam pembangunan pertanian di propinsi Riau sering terkendala dengan konversi lahan pertanian pangan. Konversi lahan sawah menjadi lahan perkebunan sawit sekitar 40,20%, sementara pertumbuhan penduduk Di Propinsi Riau cukup tinggi yaitu 3.53% per tahun. Dengan rata-rata konsumsi beras per kapita/tahun sebesar 100.35 kg, maka konsumsi beras pada tahun 2012 sebesar 594.992 ton, sementara produksi pada tahun tersebut 512.152 ton GKG atau setara dengan 321.324 ton beras maka Propinsi Riau masih kekurangan beras 273.668 ton (46%) , kekurangan ini masih didatangkan dari luar Propinsi Riau terutama dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2013.)



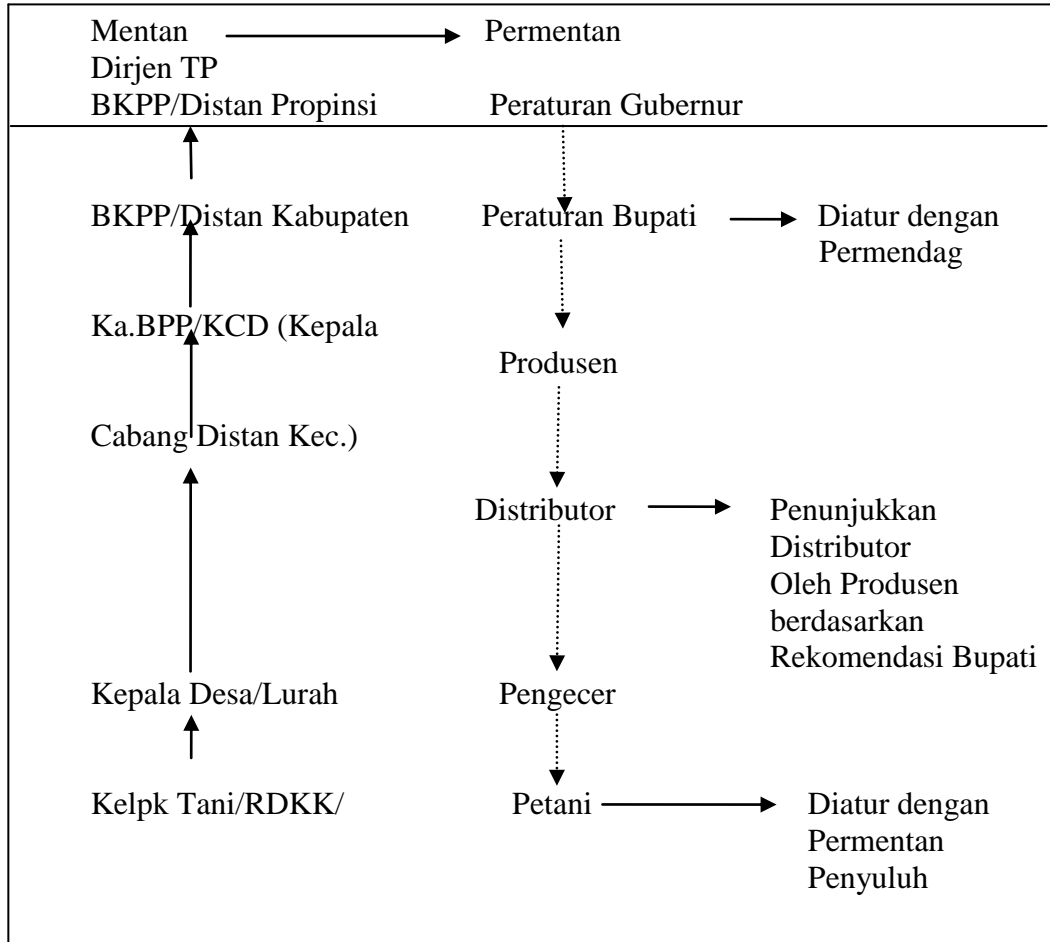
Gambar 2. Pola Panen Padi di Provinsi Riau Tahun 2007 dan 2012 (Sumber : BPS Provinsi Riau, 2013)

Pada Gambar 2. dapat dilihat luas panen, produktivitas dan produksi padi sawah di Provinsi Riau dalam kurun waktu 2007-2012. Dari Tabel tersebut terlihat bahwa luas panen cenderung fluktuatif. Hal ini juga berpengaruh pada produksi padi yang cenderung fluktuatif. Hal ini mengindikasikan bahwa belum optimalnya produksi padi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti kebutuhan pupuk, jumlah tenaga kerja, jenis benih atau bibit yang juga

Disampaikan pada Seminar Nasional "Peranan Teknologi dan Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan", November 2013

berpengaruh terhadap produksi padi. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih memperhatikan terpenuhinya kebutuhan faktor produksi di tingkat petani sehingga dapat mendukung peningkatan produksi padi yang juga akan mendukung ketahanan pangan terkait dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk.

**Distribusi Pupuk Subsidi di Provinsi Riau**



Distribusi pupuk di Provinsi Riau mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada tahun 2003 dikeluarkan peraturan yang mengatur pengadaan dan penyaluran subsidi pupuk yaitu SK Menperindag No. 70/MPP/Kep/2003 dimana pendistribusian pupuk bersubsidi berdasarkan sistem rayonisasi. Semua produsen pupuk bertanggungjawab terhadap pengadaan pupuk pada wilayah sekitarnya apabila ada kesulitan dalam pengadaanya dapat melakukan kerjasama dengan produsen lain

1. Alur Permintaan Pupuk adalah berdasarkan Rencana Definitif Kerja Kelompok Tani (RDKK) yang telah disahkan oleh Kepala Cabang Dinas Pertanian Kecamatan (KCD) kemudian diajukan ke kios pengecer resmi yang telah ditunjukkan oleh produsen dan diteruskan ke distributor dilanjutkan ke produsen yang ditembuskan ke Dinas Pertanian Kabupaten. Sementara untuk alur penyediaan pupuk adalah dari produsen disalurkan melalui distributor

Disampaikan pada Seminar Nasional "Peranan Teknologi dan Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan", November 2013

yang telah terdaftar kemudian disalurkan ke kios pengecer resmi berdasarkan RDKK yang disyahkan KCD. Alur pembelian diawali dengan RDKK yang oleh ketua kelompok tani dibawa ke kios resmi

2. Sistem pembayaran untuk pupuk subsidi ini adalah kelompok tani akan membayar pupuk pada saat setelah panen (yarnen) ke kios pengecer, sementara pengecer pupuk harus membayar secara tunai ke distributor demikian pula Distributor. Sementara PT. PIM akan menagih pembayaran untuk pupuk yang sudah disalurkan ke Kementrian Pertanian di Jakarta

### **Karakteristik Usahatani Padi di Lokasi Penelitian**

Untuk meningkatkan Produksi Padi di Propinsi Riau maka sejak tahun 2009 pemerintah melalui Dinas Tanaman Pangan dan hortikultura melaksanakan strategi pengembangan tanaman padi melalui kegiatan optimalisasi lahan IP 100 – IP 200, kegiatan Rehabilitasi Sawah Terlantar dan kegiatan Cetak Sawah Baru. Program ini dikenal dengan Operasi Pangan Riau Makmur yang dilakukan selama 5 tahun pelaksanaan. Sumber anggaran untuk kegiatan ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi, APBD Kabupaten dan APBN. Bantuan sarana produksi berupa paket pupuk, bibit dan herbisida diambil dari dana APBD.

Kegiatan usahatani padi yang dilakukan oleh petani di daerah penelitian pada umumnya hampir sama dimulai dari kegiatan pembersihan lahan, menebas, menanam, pemeliharaann (penyiangan dan penyemprotan hama dan penyakit) dan akhirnya panen. Benih yang digunakan didaerah penelitian berbeda-beda untuk di Kecamatan Rimbo Malintang Kabupaten Rokan Hilir pada umumnya menggunakan benih bibit unggul nasional Ciherang, demikian juga di Kecamatan Kuansing hanya berbeda varietas yaitu Batang Piaman. Sementara di Kecamatan Kuala Kampar petani banyak menggunakan benih unggul lokal Cekau dan Karya pelalawan dan sedikit yang menggunakan unggul nasional batang piaman.

Frekuensi penanaman padi di tiga wilayah penelitian ada perbedaan untuk Kecamatan Kuala Kampar masih menanam hanya satu kali penanaman dalam satu tahun (IP 100). Penanaman dilakukan pada Bulan Agustus/September yang akan dipanen pada bulan Januari/Februari. Kecamatan Rohil dan Kuansing sudah menerapkan dua kali dalam satu tahun. Penanaman di lokasi penelitian menggunakan sistem legowo 4-1 atau 3-1. Pada umumnya lahan di daerah penelitian adalah lahan pasang surut dan sudah ada sistem irigasi dengan memanfaatkan air sungai dan curah hujan.

Dalam hal pemupukan ada perbedaan di daerah penelitian. Di Kecamatan Rimbo Malintang Kabupaten Rokan Hilir, pada umumnya petani ada yang menggunakan pupuk dan ada pula yang tidak menggunakan pupuk dalam usahataniya, pupuk subsidi dapat diperoleh di koperasi yang merupakan kios pengecer resmi di wilayah setempat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati *et al* (2010) penggunaan pupuk optimal untuk varietas Ciherang di Rokan Hilir adalah 160 kg urea/Ha; 100 kg/ha SP 36 dan 50 kg KCl/Ha, dengan hasil produksi gabah berkisar 6 ton/ha. Sedangkan apabila petani yang tidak menggunakan pupuk produksi yang dihasilkan rata-rata 4 ton/ha. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata produksi padi masih di bawah hasil optimal, yaitu rata-rata hanya sekitar 3,07 ton/ha. Jadi masih ada gap antara

Disampaikan pada Seminar Nasional “Peranan Teknologi dan Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan”, November 2013

potensi optimal yang seharusnya bisa diperoleh. Beras/gabah yang dihasilkan di daerah ini pada umumnya dipasarkan ke daerah Sumatera Utara.

Kecamatan Kuantan tengah di Kabupaten Kuansing pada umumnya petani menggunakan pupuk untuk usahatani. Harga pupuk subsidi di daerah ini sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini didukung oleh keberadaan distributor yang cukup banyak disini yaitu ada 5 distributor yang siap mengangkut pupuk dari gudang PIM di Dumai sampai ke lokasi juga jalur transportasi yang baik dan lancar, serta bimbingan dari Petugas Penyuluh Lapangan yang intensif terhadap petani. Petani di Kuansing sudah dapat menjadikan tanaman padi sebagai sumber pendapatan selain karet dan sawit. Sudah ada kelompok tani yang melakukan kontrak kerja sama dalam penjualan beras dengan toko swalayan sehingga pemasaran hasil produknya cukup terjamin. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh dinas pertanian setempat hasil yang optimal akan diperoleh dengan pemakaian benih 25 kg/ha; urea 150 kg/ha; TSP 100 kg/ha; KCl 50 kg/ha dan insektisida 2 liter/ha. Produksi padi yang dihasilkan cukup tinggi rata-rata berkisar antara 7-8 ton/ha. Namun yang diperoleh dari hasil penelitian ini ternyata rata-rata produksi padi dari informasi responden masih di bawah hasil optimal, yaitu rata-rata hanya sekitar 3.73 ton/ha. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terjadi gap yang cukup jauh antara potensi optimal yang bisa diperoleh dengan kondisi saat ini.

Petani Di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, pada umumnya tidak menggunakan pupuk dalam usahatani. Pupuk yang tersedia cukup jauh dari lokasi sawah, yaitu di ibu kota kecamatan dengan jarak 35 km. Demikian pula ke ibu kota kabupaten berjarak 367 km. Transportasi pengangkutan pupuk sangat besar menyebabkan pupuk menjadi mahal. Dengan luas garapan berkisar antara 2-3 ha, tanpa pemupukan maka produk dihasilkan rata-rata sekitar 4 ton per ha. Bila menggunakan pupuk produksi padi dapat mencapai 7 ton/ha (PPL Kuala Kampar, 2013). Untuk padi Cekau sudah cukup luas pemasarannya, yaitu Ke Kepulauan Riau, Kabupaten Bengkalis bahkan sampai ke Kalimantan (PPL, Kecamatan Kuala Kampar, 2013). Rata-rata produksi di daerah ini sekitar 3,25 ton/ha, meskipun sebagian besar petani tidak menggunakan pupuk.

### Analisis Efisiensi Usahatani Padi Di Lokasi Penelitian

Salah satu ukuran keberhasilan petani untuk melaksanakan usahatani adalah terjadinya peningkatan pendapatan dan efisiensi. Salah satu indikatornya adalah Return Cost Ratio (RCR). RCR untuk masing-masing lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. RCR usahatani yang menggunakan pupuk subsidi dan tidak menggunakan pupuk subsidi

Keterangan	RCR		
	Rohil	Kuansing	Kuala Kampar
Menggunakan pupuk subsidi	3.12	4.36	-
Tidak menggunakan	2.23	-	3.10

Sumber: data penelitian 2013

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa bagi petani yang menggunakan pupuk subsidi RCR nya lebih tinggi dibandingkan petani yang tidak menggunakan pupuk

Disampaikan pada Seminar Nasional "Peranan Teknologi dan Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan", November 2013

subsidi. Oleh karena itu kebijakan subsidi pupuk masih sangat diperlukan oleh petani untuk menekan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan petani.

Produksi padi yang dihasilkan oleh petani dilokasi penelitian sebagian besar dijual ke luar Provinsi Riau, proporsi yang dijual besar dibandingkan dengan yang dikonsumsi. Di Rohil proporsi yang dijual 84, 63%, Kuansing 72,89% dan di Kuala Kampar 75,79%. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap persediaan beras di Provinsi Riau.

### KESIMPULAN

1. RCR petani yang menggunakan pupuk subsidi lebih besar dibandingkan petani yang tidak menggunakan pupuk subsidi dalam usahatani padi yang dilakukan, hal ini menunjukkan bahwa petani yang menggunakan pupuk subsidi lebih efisien dibandingkan dengan petani yang tidak menggunakan pupuk subsidi dalam usahatannya.
2. Kebijakan subsidi pupuk masih diperlukan oleh petani untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani
3. Hasil produksi padi yang dihasilkan banyak terjual keluar Provinsi Riau, sehingga akan berpengaruh terhadap persediaan beras di Provinsi Riau

### DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI), 2011. Harga Eceran Tertinggi Pupuk di Indonesia 1988 – 2010. APPI, Jakarta.
- Cholid, I. 2011. Penyelewengan Pupuk Bersubsidi diungkap Pattiro. [Jurnal Berita Online]. <http://jurnalberita.com/201104/penyelewengan-pupuk-bersubsidi-diungkap-pattiro.htm> [ 26 April 2011]
- Darwis, V. Dan AR Nurmanaf. 2004. Kebijakan Distribusi, Tingkat Harga dan Penggunaan Pupuk di Tingkat Petani. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 22:63-73.
- Darwis, V. Dan C. Muslim. 2007. Revitalisasi Kebijakan Sistem Distribusi Pupuk dalam Mendukung Ketersediaan Pupuk Bersubsidi di Tingkat Petani. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 15: 141-168.
- Depta, 2006. Model Subsidi Pertanian Terpadu : Landasan Konseptual dan Faktual serta Sistem Operasinya.
- Firdaus, M.L, M Baga dan P Pratiwi, 2008. Swasembada Beras dari Masa ke Masa (Telaah efektivitas Kebijakan dan Perumusan Strategi Nasional). IPB Press. Bogor.
- Handoko, R dan P Patriadi. 2005. Evaluasi Kebijakan Subsidi Non BBM. Kajian Ekonomi dan Keuangan. 9: 42-64.
- Hadi, P.U., Dewa KS. Swastica, Frans B.M. Dabukke, D. Hidayat, Nur K. Agustin dan M. Maulana. 2007. “Analisis Penawaran dan Permintaan Pupuk di Indonesia 2007-2012. Laporan Teknis Hasil Penelitian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Hadi, P.U, Sri H Susilowati, B. Rachman, Helena, J. Purba dan Tri B. Purwantini. 2009. Perumusan Model Subsidi Pertanian untuk Meningkatkan Produksi Pangan dan Pendapatan Petani. Laporan Akhir. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Litbang Pertanian Bogor.

Disampaikan pada Seminar Nasional “Peranan Teknologi dan Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan”, November 2013

- Rachman B. 2009. Kebijakan Subsidi Pupuk : Tinjauan terhadap Aspek Teknis, Manajemen dan Regulasi. Analisis Kebijakan Pertanian. 7 : 131-146.
- Suryana, A. 2006. Menyikapi Isu dan Dampak Lingkungan di Sektor Pertanian. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Pengendalian Pencemaran Lingkungan Pertanian melalui Pendekatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara Terpadu. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 28 Maret 2006 di Solo.
- Sirappa. M.P, A.J. Rieuwpassa dan Edwen D. Waas. 2007. Kajian Pemberian Pupuk NPK pada Beberapa Varietas Unggul Padi Sawah di Seram Utara. Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Volume 10 Nomor 1. P 48-49.